

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu industri yang turut memajukan perekonomian di Indonesia. Selain berperan dalam pertumbuhan perekonomian, UMKM memiliki peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja yang tiap tahun menunjukkan grafik yang terus meningkat. Selain itu, UMKM juga berperan dalam perindustrian hasil-hasil pembangunan (Narsa, 2014).

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia tahun 2014, diketahui bahwa jumlah UMKM mencapai 56,5 juta lebih UMKM. Data yang ada menunjukkan UMKM mengalami perkembangan setiap tahunnya. Perkembangan tersebut bisa kita lihat dari naiknya jumlah UMKM dari tahun ke tahun. Melihat kenyataan tersebut, bukan hal yang mengherankan apabila selama ini UMKM disebut sebagai pemegang kontribusi tertinggi dari Produk Domestik Bruto.

UMKM sebagai suatu entitas bisnis yang setiap tahun selalu mengalami pertumbuhan, sehingga akan meningkatkan persaingan yang ketat, maka dari itu UMKM juga dituntut bisa menyajikan laporan keuangan yang berguna untuk mengetahui tingkat kesehatan usahanya dan membuat strategi-strategi usaha. IAI (2009:2) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan

ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada pihak internal maupun eksternal.

Penyusunan laporan keuangan pada UMKM memiliki beberapa manfaat bagi pihak eksternal dan internal UMKM. Bagi pihak eksternal, pencatatan akuntansi memberikan kemudahan mengakses peminjaman kredit pada lembaga keuangan, untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan. Sedangkan untuk pihak internal yaitu dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga dapat mengevaluasi kinerja UMKM yang sudah dijalankan selama tahun periode.

Sehubungan dengan pentingnya laporan keuangan bagi suatu entitas, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2009 telah meluncurkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang mulai efektif per 1 Januari 2011. Sesuai dengan ruang lingkup SAK ETAP maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan seperti Koperasi dan UMKM.

Dalam penerapan SAK ETAP, tidak sepenuhnya dapat berjalan sesuai ketentuan. Hal ini dikarenakan sebagian pelaku UMKM menganggap laporan keuangan masih suatu hal yang tabu. Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya manfaat laporan keuangan masih menjadi salah satu alasan para pelaku UMKM tersebut tidak patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Padahal jika dilihat dari manfaatnya, laporan keuangan bermanfaat terhadap keberlangsungan usahanya.

Di sisi lain, pelaku UMKM yang mengerti akan pentingnya laporan keuangan menyambut baik hadirnya SAK ETAP ini. Di dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan dibandingkan dengan PSAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengungkap tingkat penerapan laporan keuangan sesuai SAK ETAP pada UMKM.

Penelitian ini dilakukan pada UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo merupakan kabupaten dengan jumlah UMKM terbanyak di Indonesia (www.ukmsidoarjo.com). Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada UMKM di Sidoarjo dalam menerapkan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.

Penelitian penerapan SAK ETAP pada entitas skala mikro, kecil dan menengah di Indonesia ini pada umumnya menggunakan pendekatan kualitatif yang hanya melihat pada satu UMKM saja. Karena itu isu penerapan SAK ETAP pada UMKM dengan pendekatan kuantitatif merupakan hal yang menarik untuk diteliti.

Penelitian tentang keterterapan SAK ETAP pada koperasi serta persepsi pelaku koperasi dan akuntan pendidik dilakukan oleh Narsa (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keterterapan SAK ETAP masuk pada kategori 'Kurang Diterapkan', persepsi pelaku koperasi dan akuntan pendidik terhadap SAK ETAP adalah 'Setuju' dengan diterapkannya laporan keuangan berbasis SAK ETAP. Namun meski begitu hasil statistik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara kelompok pelaku koperasi dengan akuntan pendidik.

Sari (2014) melakukan penelitian tentang penyusunan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas

publik (SAK ETAP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan yang di susun oleh Perusahaan Rokok Trubus Alami belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) dan hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan sumber daya manusia yang dimiliki.

Penelitian Mansyur (2012) tentang persepsi pelaku usaha mikro kecil menengah atas penggunaan laporan keuangan dilakukan di pada UMKM Mitra Binaan PT. Telkom Indonesia, Tbk Wilayah VII KTI. Hasil penelitian menunjukkan pelaku UMKM mitra binaan memiliki persepsi negatif atas penggunaan laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian Narsa (2014). Penelitian ini mencoba meneliti ulang dengan objek yang berbeda yaitu UMKM dan menambah aspek-aspek yang menjadi keterbatasan penelitian sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sejauh mana tingkat penerapan SAK ETAP pada UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat penerapan SAK ETAP pada UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi UMKM, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang bermanfaat terkait dengan penerapan SAK ETAP serta manfaat SAK ETAP terhadap keberlangsungan usahanya.
2. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan terkait penerapan SAK ETAP pada UMKM sehingga dapat melakukan evaluasi mengenai standar penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP.
3. Bagi Penulis, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan tentang penerapan SAK ETAP pada UMKM.
4. Bagi pihak lain, penelitian ini memberikan gambaran mengenai penerapan SAK ETAP pada UMKM.